

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jembatan Lolong di Lolong Belanti Kota Padang

Fitri Yanti¹, Delmira Syafrini^{2*}, Rosidah Rosidah³, Hana Thalia Puspita⁴, Khaira Nisa⁵, Khoirin Yelnisa⁶, Shinta Rahmadhani⁷, Hamila Yatursi⁸, Rara Amanda⁹, Ratna Juwita¹⁰, Selvia Putri Darni¹¹, Fadilla Saputri¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jembatan Lolong di Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena realitanya keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Lolong Belanti, yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis temuan adalah Teori Modernisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data ini menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman dengan tahapan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi sistem tender yang tidak melibatkan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, minimnya komunikasi dalam proses pembangunan, dan tidak adanya musyawarah yang partisipatif. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, yang berdampak pada rendahnya rasa memiliki dan kepercayaan terhadap proyek pembangunan.

Kata Kunci: Infrastruktur; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan.

Abstract

This study aims to analyze the low level of community participation in the construction of the Lolong Bridge in Lolong Belanti, Padang Utara District, Padang City. This study is interesting to conduct because in reality community involvement has an effect on the development process. The location of the study was in Lolong Belanti Village, which is one of the villages in Padang Utara District. The study used a qualitative method with an exploratory approach to reveal the factors that influence community participation in the development process. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, field observations, and documentation. This data analysis used interactive analysis techniques from Miles and Huberman with stages through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study showed that low community participation was caused by several factors, including: a tender system that did not involve the community, low socialization from the government, minimal communication in the development process, and the absence of participatory deliberation. The community felt that they were not involved in every stage of development, from planning to implementation, which resulted in a low sense of ownership and trust in the development project.

Keywords: Community Participation; Development; Infrastructure.

How to Cite: Yanti, F, et al. (2024). Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jembatan Lolong di Lolong Belanti Kota Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2024. (pp. 89-97). Padang: Universitas Negeri Padang.



Pendahuluan

Perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bertujuan mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Arbayah & Suparti 2022). Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pangemanan, 2017).

Perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat, dilakukan dengan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga di tingkat provinsi. Pada tingkat desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Masyarakat desa melalui Musrenbangdes diberi ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan program kebijakan perencanaan pembangunan, serta membahas bersama permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya di tingkat desa. Namun pada pelaksanaannya Musrenbangdes seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis (Arbayah & Suparti, 2022). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Soetrisno (1995) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, 1994). Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian Pembangunan (Pangemanan, 2017). Kelurahan Lolong Belanti merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Melihat keberadaan kelurahan tersebut dari segi sosial dan kultural cukup menarik, karena Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu kecamatan inti sebelum terjadi pemekaran wilayah Kota Padang. Kecamatan Padang Utara memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 69.479 orang (Padang dalam angka, 2014) yang terdiri dari tujuh kelurahan yaitu; Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan dan Ulak Karang Utara (In et al. 2019).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menyadari partisipasi masyarakat bahwasannya akses jalan tersebut sangat penting untuk menghubungkan akses jalan dari Teluk Bayur Kota Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy kembali melanjutkan tahapan pembangunan jalan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dapat berdampak terjadinya permasalahan-permasalahan tertentu dalam lingkungan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jembatan lolong di Lolong Belanti Kec. Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena diharapkan peneliti dapat menghasilkan uraian-uraian rinci dari hasil tulisan, ucapan, dokumentasi, dari setiap individu maupun fenomena. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami mana

yang diteliti oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemauan manusia (Creswell, 2015). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti, mengumpulkan data yang spesifikasi dari partisipasi, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan mengarahkan percakapan untuk mengumpulkan suatu informasi yang didapatkan selama di lapangan, observasi seperti mengamati suatu permasalahan yang terjadi didalam lingkungan tersebut dan dokumentasi seperti video, foto dan rekaman suara. Informan penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang dengan kriteria seperti Ketua Karang Taruna dan 4 Masyarakat setempat. Teknik pemilihan informan digunakan dengan cara *purposive sampling* karena informasi yang peneliti dapatkan langsung dari pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh informan tersebut, sehingga peneliti dengan mudah untuk mendapatkan jawaban serta menganalisisnya.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data adalah proses pemilihan data-data mana saja yang penting disajikan di dalam laporan, display data (penyajian data) ialah data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat biasanya bersifat narasi dan deskriptif dan penarikan kesimpulan/verifikasi (menarik kesimpulan) bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Suharsaputra, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jembatan Lolong Akibat Sistem Tender Pemerintah

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan, dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti aparat pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada dasarnya untuk menggerakkan masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembangunan. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, hal ini didasari pada motivasi dan individu-individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu tersebut, maka partisipasi dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Kata motivasi berarti motif atau hal yang menyangkut dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan orang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Keberhasilan pembangunan yang berlangsung, di tentukan oleh partisipasi masyarakat juga nilai-nilai tradisional yang mendasari keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat digerakan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk yang berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Menurut Alex Netisimito dalam Syafrizal (2008) pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan dari respon masyarakat, karena tidak adanya respon dari suatu masyarakat semua kegiatan semua pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan). Pembangunan dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses keterlibatan mereka baik dalam tahap pemerintah, atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi masing-masing yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat belum berjalan dengan efektif. Menurut Conyers Diana (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat masih ada yang acuh dalam partisipasi pembangunan infrastruktur ini kebanyakan menganggap bahwa pembangunan infrastruktur itu urusan pemerintah setempat, dengan hasil observasi pada masyarakat. Partisipasi Masyarakat taplau kota padang terhadap Infrastruktur cenderung belum efektif,

karena masih banyak masyarakat yang jarang ikut serta dalam rapat karena sebagian masyarakat masih banyak ketidaktahuan masyarakat bahwa dalam pembangunan infrastruktur masyarakat pun seharusnya terlibat karena kurangnya pemberitahuan atau ajakan langsung dari pemerintahnya, apabila kesadaran masyarakat kurang/partisipasi masyarakat kurang, maka tidak ada yang menyadarkan pemerintah setempat untuk memperbaiki infrastruktur yang belum terselesaikan. Hal ini didasari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur setempat dan keacuhan antar masyarakat. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat ataupun sebaliknya.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Indra (36 th) selaku pemuda setempat disebutkan bahwa:

“...Dari awal pembangunan jembatan lolong masyarakat di lingkungan tersebut tidak pernah ikut terlibat Karena dalam sistem pembangunan ini sistemnya tender. Jadi partisipasi untuk masyarakat baik itu pemuda atau pemuka masyarakatnya memang tidak ada, kami di sini hanya sebagai penonton.” (Wawancara tanggal 13 November 2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Indra di atas, dapat dijelaskan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Jembatan Lolong ini masih minim dikarenakan sistem pembangunan yang menggunakan mekanisme tender. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat, baik pemuda maupun tokoh masyarakat, tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan tersebut. Akibatnya, partisipasi aktif masyarakat hanya terbatas pada posisi sebagai pengamat, tanpa kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eni (41 Tahun) selaku warga setempat ditemukan informasi sebagai berikut:

“...Seharusnya ada koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, minimal untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga,” ujar Pak RT. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa tidak adanya musyawarah yang melibatkan warga dari awal hingga akhir proyek menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan ini. Pemberitahuan hanya sebatas formalitas ke kelurahan, tanpa ada sosialisasi yang terstruktur dari kontraktor ke lurah, RW, RT, hingga ke masyarakat. Pak RT meyakini bahwa jika ada musyawarah yang baik dan melibatkan semua pihak, berbagai konflik dan kesalahpahaman bisa dihindari.” (Wawancara tanggal 13 November 2024).

Berdasarkan di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan Jembatan Lolong memiliki kelemahan dalam aspek koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat setempat. Tidak adanya musyawarah yang melibatkan warga dari awal hingga akhir proyek menunjukkan kurangnya pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan. Pemberitahuan yang hanya bersifat formalitas tanpa sosialisasi yang terstruktur dari kontraktor ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lurah, RW, hingga RT, mencerminkan minimnya transparansi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dihindari jika komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dilakukan secara efektif.

Selanjutnya Ibu Ita (39 tahun) selaku warga setempat juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...Berbicara tentang proses pembangunan, proyek ini sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah tanpa melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Terkait kompensasi, pemerintah telah menyiapkan skema ganti rugi, namun hingga saat ini belum ada musyawarah final yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Proses ini membutuhkan serangkaian pertemuan dan kesepakatan dengan warga, dimana kompensasi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau lahan pengganti, tergantung pada hasil kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pembangunan sebelumnya, ada perbedaan signifikan dalam hal prosedur dan dampak terhadap masyarakat. Pembangunan terdahulu tidak memerlukan rapat formal karena lokasi pembangunan berada di lahan kosong yang tidak dimiliki warga. Namun, untuk rencana pembangunan selanjutnya, situasinya menjadi lebih kompleks karena berpotensi mempengaruhi pemukiman warga. Menariknya, rencana awal yang diperkirakan akan berdampak pada rumah-rumah penduduk kemudian mengalami revisi dengan menggeser arah pembangunan ke tepi pantai. Spekulasi beredar bahwa perubahan ini terjadi karena dana kompensasi yang telah habis terpakai.” (Wawancara tanggal 13 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eni di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan Jembatan Lolong memiliki kelemahan dalam aspek koordinasi dan komunikasi

dengan masyarakat setempat. Tidak adanya musyawarah yang melibatkan warga dari awal hingga akhir proyek menunjukkan kurangnya pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan. Pemberitahuan yang hanya bersifat formalitas tanpa sosialisasi yang terstruktur dari kontraktor ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lurah, RW, hingga RT, mencerminkan minimnya transparansi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dihindari jika komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dilakukan secara efektif. Hal ini dapat menggambarkan bahwasanya bukan masyarakat yang tidak mau terlibat melainkan pemerintah sendiri lah yang tidak mau melibatkan masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam kehidupan bernegara menjadi tugas pokok pemerintah adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan pembangunan yang dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah seringkali disebut sebagai upaya pembangunan. Menurut Sumbi & Firdausi (2016) pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-daya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh elit masyarakat yang merasa tau dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang lebih cocok bagi masyarakat.

Potensi sumberdaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai usaha mengubah sumberdaya yang bersifat potensial menjadi aktual. Sumber daya manusia (human capital) menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebagai pengelola dan pelaku pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia (Sumbi & Firdausi, 2016).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan aspek krusial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terungkap berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Indra (36 tahun), "Dari awal pembangunan masyarakat di lingkungan tersebut tidak pernah dilibatkan untuk partisipasi pembangunan, baik untuk menjaga alat berat maupun untuk bekerja tidak ada dilibatkan. Karena dalam sistem pembangunan ini sistemnya tender. Jadi otomatis siapa yang menang tender itulah yang memegang pekerjaan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem tender yang diterapkan justru mengesampingkan partisipasi masyarakat lokal.

Dampak dari minimnya pelibatan masyarakat ini semakin terlihat dari berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didi (45 tahun) selaku RT:

"...Mengungkapkan adanya dampak kontras bagi warga, dimana sekitar 20-30 unit rumah warga mengalami kerusakan atau terpaksa direlokasi. Meskipun pembangunan ini dipandang sebagai terobosan baru untuk sektor pariwisata karena akan memudahkan akses langsung ke Bandara Internasional Minangkabau, namun ketidaklibatan masyarakat sejak awal menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap proyek tersebut". (Wawancara tanggal 13 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Didi diatas, dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan ini menimbulkan dampak yang kontroversial. Di satu sisi, proyek ini dianggap sebagai terobosan positif untuk sektor pariwisata karena akan mempermudah akses ke bandara. Namun disisi lain, proyek ini berdampak negatif bagi 20-30 unit rumah warga yang harus direlokasi atau mengalami kerusakan. Minimnya komunikasi dan pelibatan warga sejak tahap awal mengakibatkan timbulnya persoalan di masyarakat serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan proyek ini.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Eni (41 tahun) selaku warga setempat yaitu:

"...Pentingnya musyawarah dan komunikasi dengan masyarakat juga harus diperhatikan. Dengan adanya persetujuan, serta ada beberapa kali rapat baru bisa melanjutkan pembangunan tersebut. Bantuan yang diberi bisa berupa uang atau lahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mengharapkan adanya dialog dan keterlibatan dalam proses pembangunan, bukan hanya sekedar menjadi penonton di wilayah mereka sendiri". (Wawancara tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eni dapat disimpulkan, bahwa komunikasi dan konsultasi dengan warga setempat menjadi kunci utama dalam setiap tahapan pembangunan. Masyarakat ingin dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, tidak sekedar menjadi

pengamat di lingkungan mereka sendiri. Keseriusan partisipasi masyarakat ini tercermin dari kesiapan mereka memberikan dukungan, baik berupa sumbangan finansial maupun aset tanah, yang tentunya harus diawali dengan serangkaian pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum proyek pembangunan dapat dilaksanakan.

Permasalahan semakin kompleks ketika muncul isu ganti rugi dan kompensasi yang belum terselesaikan dengan baik. Meskipun telah diadakan berbagai pertemuan dan survei lokasi, belum ada keputusan final yang disepakati. Kendala utama terletak pada status tanah di sekitar SD 15 yang memiliki sertifikat resmi, sementara sebagian besar tanah di wilayah tersebut tidak bersertifikat dan warga hanya membayar PBB mengingat statusnya yang masih termasuk dalam Tanah Keraton.

Kondisi ini semakin memperkuat argumen bahwa keterlibatan masyarakat sejak awal sangat penting dalam setiap proyek pembangunan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapan, mereka akan lebih memahami seluk-beluk proyek tersebut dan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi potensi konflik dan penolakan dari masyarakat, serta meningkatkan keberlanjutan proyek pembangunan tersebut dalam jangka panjang. Harapan masyarakat seperti yang diungkapkan dalam wawancara adalah adanya peluang lapangan pekerjaan yang terbuka, terutama bagi pemuda pengangguran setelah pembangunan selesai. Mereka berharap bisa mencari pekerjaan seperti menjadi tukang parkir atau membuka usaha mereka sendiri yang dapat menguntungkan masyarakat. Namun, tanpa adanya pelibatan dan dialog yang baik dengan masyarakat sejak awal, harapan-harapan ini mungkin akan sulit terealisasi dan justru dapat menimbulkan masalah sosial baru di kemudian hari.

Hak masyarakat dalam Pembangunan yang Demokratis

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Dalam demokrasi masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan di daerah mereka hal ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi, yang di mana rakyat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai bagian integral dari hak demokrasi, yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran dan masukan mengenai jenis pembangunan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, disini masyarakat menjadi indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa pada tahapan perencanaan pembangunan diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi: "Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan Pembangunan".

Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Situasi ini bisa muncul karena beberapa alasan, diantaranya yaitu: Pembangunan hanya memberikan keuntungan bagi sekelompok kecil masyarakat dan tidak menguntungkan banyak orang. Kemudian Pembangunan, meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Dan terakhir pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Keikutsertaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan meliputi keseluruhan proses mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu: Partisipasi dalam proses pembuatan Keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Kaehe et al., 2019)

Namun, dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Indra (36 tahun) selaku pemuda setempat ditemukan informasi bahwa:

"...Dari awal pembangunan masyarakat di lingkungan tersebut tidak pernah dilibatkan untuk partisipasi pembangunan, baik untuk menjaga alat berat maupun untuk bekerja tidak ada dilibatkan. Karena dalam sistem pembangunan ini sistemnya tender, jadi otomatis siapa yang menang tender itulah yang memegang pekerjaan. Jadi partisipasi untuk masyarakat baik itu pemuda atau pemuka masyarakatnya memang tidak ada, kami di sini hanya sebagai penonton". (Wawancara tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Indra dapat dilihat bahwa, masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses pembangunan di daerah mereka. Hal ini tentu menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Menurut prinsip demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Hak berpendapat dan berpartisipasi merupakan hak asasi manusia yang vital dalam masyarakat demokratis. Namun, dalam wawancara tersebut mengindikasikan bahwa hak berpendapat masyarakat tidak dihormati dan diakui dalam proses pembangunan tersebut. Masyarakat hanya dianggap sebagai penonton dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eni (41 tahun) selaku warga setempat:

“...Tidak ada rapatnya karena pembangunan sebelumnya tidak ada mengenai lahan warga, hanya tanah kosong yang tidak ada bangunan warga. Tapi dulu katanya jika dilanjutkan rumah warga akan kena tetapi ada informasi lagi bahwa pembangunan akan digeser ke arah tepi pantai sehingga tidak akan mengenai rumah-rumah warga kemungkinan uang untuk ganti rugi tersebut sudah habis. Jika pembangunan akan dilanjutkan maka kami akan pergi rapat ke kantor lurah seperti 2 tahun yang lalu ada pengukuran terhadap jembatan tersebut kami disuruh ke kantor lurah untuk diberitahu dan rapat. Pas pembangunan masyarakat tidak ada ikut serta dalam pembangunan tersebut karena tidak mengenai rumah atau lahan warga hanya melapor ke RT saja”. (13 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Eni maka dapat dilihat bahwa, masyarakat setempat kurang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan hak berpendapat dalam pembangunan yang demokratis. Ibu Eni menjelaskan bahwa tidak ada rapat khusus yang melibatkan warga karena pembangunan tidak menyentuh lahan atau rumah warga secara langsung. Namun, ketika pembangunan berpotensi berdampak pada warga, seperti dua tahun lalu saat ada pengukuran jembatan, warga sempat dilibatkan dalam rapat di kantor lurah. Meskipun ada pelaporan kepada RT, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan cenderung minim dan hanya terjadi jika ada dampak langsung pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hak berpendapat masyarakat tidak sepenuhnya diakomodasi secara proaktif dalam proses pembangunan, melainkan hanya direspon ketika ada situasi tertentu yang mendesak.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Didi (45 Tahun) selaku RT:

“...Sejak awal hingga saat ini, warga setempat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Baik dalam hal pengamanan alat berat, pekerjaan konstruksi, maupun pengawasan proyek. Beliau menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena proyek menggunakan sistem tender, di mana pemenang tender memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan proyek. Seharusnya ada koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, minimal untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga. Tidak adanya musyawarah yang melibatkan warga dari awal hingga akhir proyek menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan ini. Pemberitahuan hanya sebatas formalitas ke kelurahan, tanpa ada sosialisasi yang terstruktur dari kontraktor ke lurah, RW, RT, hingga ke masyarakat”. (Wawancara tanggal 13 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Didi dapat disimpulkan bahwa, masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan proyek yang demokratis. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran mereka dalam pengamanan alat berat, pekerjaan konstruksi, dan pengawasan proyek. Pak didi juga menyoroti bahwa proyek menggunakan sistem tender yang memberi pemenang tender wewenang penuh tanpa adanya koordinasi yang memadai dengan tokoh masyarakat setempat. Tidak adanya musyawarah sejak awal hingga akhir proyek menyebabkan minimnya sosialisasi yang terstruktur, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman di masyarakat. Beliau meyakini bahwa partisipasi masyarakat melalui musyawarah yang baik dapat membantu menghindari masalah tersebut.

Maka dalam hal ini, melibatkan masyarakat dalam pembangunan adalah suatu hak demokrasi yang fundamental. Hal ini tidak hanya memperkuat demokrasi itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat berhak untuk memberikan saran dan berpartisipasi aktif dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga hasilnya dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Pembahasan

Teori modernisasi merupakan teori yang menjelaskan seperti apa proses modernisasi dalam suatu masyarakat di negara berkembang. Teori modernisasi menggambarkan pembangunan sebagai suatu rute

evolusi seragam yang diikuti oleh seluruh masyarakat, dari masyarakat agraris, pedesaan, dan tradisional hingga masyarakat pasca industri, perkotaan, dan modern (Shrum, 2000). Dimana semua masyarakat, setelah terlibat dalam proses modernisasi, mengikuti urutan tahap perkembangan yang telah ditentukan sebelumnya: ekonomi tradisional, transisi ke lepas landas, lepas landas itu sendiri, dorongan menuju kedewasaan, usia konsumsi tinggi, dan masyarakat pasca industri (Chirot dan Hall, 1992). Teori modernisasi ini menilai bahwa semakin tinggi pendidikan, ekonomi, serta institusi politik maka akan menjadi semakin demokratis. Modernisasi didasarkan pada faktor non material penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran (Budiman, 1996).

Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai sebuah jalur evolusi serta diikuti oleh semua masyarakat, yang mulai dari masyarakat pertanian, pedesaan, dan tradisional hingga masyarakat pasca-industri, perkotaan, dan modern. Teori modernisasi menekankan pada kekuatan internal serta sumber-sumber pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan formal, ekonomi berbasis pasar, dan struktur politik yang demokratis dan sekuler. Meskipun teori ini tidak mengesampingkan kekuatan internal dan sumber-sumber perubahan sosial serta pembangunan ekonomi, dimana teori ini kurang berfokus pada pengaruh asing (Jenkins dan Scanlan, 2001). Teori modernisasi termasuk teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan. Terdapat dua teori besar yang mempengaruhi teori modernisasi, yakni teori evolusi dan fungsional (Rosmalah, Sitti et al., 2024).

Teori modernisasi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sering kali diabaikan oleh masyarakat. Dimana tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pembangunan jembatan tanpa akses jalan mencerminkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang berujung pada ketidakpuasan dan skeptisisme publik terhadap proyek tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan tersebut.

Dalam perspektif modernisasi, pemerintah memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan. Masyarakat cenderung dianggap sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang aktif terlibat. Hal ini dapat menjelaskan mengapa masyarakat di Ulak Karang Selatan memiliki peran yang minim dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. Teori modernisasi berasumsi bahwa masyarakat secara otomatis menyadari manfaat pembangunan dan mendukungnya. Pada kenyataannya, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana pembangunan jembatan akan memberikan manfaat bagi mereka. Ini disebabkan akibat kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sejauh menyangkut teori modernisasi, pembangunan hanyalah masalah transfer pengetahuan dan teknologi yang tidak bermasalah dan langsung, bebas konteks, dan tidak mengganggu tatanan sosial dan budaya yang ada di negara-negara berkembang (Herkenrath dan Bornschieer, 2003).

Teori ini relevan digunakan karena membahas tentang transformasi masyarakat dari tradisional ke modern melalui pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, politik, dan budaya. Teori ini menunjukkan bahwa modernisasi sering kali tidak mempertimbangkan kondisi lokal, yang mengakibatkan alienasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dianggap tidak relevan atau tidak menguntungkan bagi mereka. Analisis berdasarkan teori modernisasi dapat membantu memahami identitas budaya lokal dan nilai-nilai tradisional mereka. Dengan demikian, teori ini memberikan perspektif yang berguna untuk memahami perilaku masyarakat dalam berbagai konteks sosial, termasuk dalam studi tentang rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pada laporan penelitian ini.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jembatan Lolong di Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem tender yang diterapkan menjadi penghalang utama keterlibatan masyarakat, di mana pemenang tender memiliki kendali penuh atas proyek tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga setempat. Rendahnya partisipasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kunci, seperti sistem tender tertutup, minimnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, dan tidak adanya musyawarah partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Untuk itu perlu adanya perubahan mendasar dalam pendekatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih inklusif dan partisipatif, yang memungkinkan masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, mendorong dialog terbuka, dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka. Masyarakat sendiri juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi

aktif dalam pembangunan, dengan cara lebih proaktif mengikuti musyawarah, memberikan masukan konstruktif, dan mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Rujukan

- Agustiani, Y. S., & Solihat, Y. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 187-195.
- Aprilianto, P., et al. (2015). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Terminal di Terminal Regional Daya Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(3).
- Chairunnisa, Y. (2013). *Kajian Penyediaan Dan Pemanfaatan Pelayanan Transportasi Publik di Kota Bekasi*. Jurnal Bumi Indonesia
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garman, D. (2019). *Memahami Teori Pembangunan*. Semarang: NEM.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Lamdu, A. K. A. A., Suthanaya, P. A., & Ariawan, I. M. A. (2018). Kajian Pemanfaatan Terminal Mengwi Terkait Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Spektran*, 6(2), 186-194.
- Liana, W. et al. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Teori Komprehensif Dan Perkembangannya)*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maimunah, S., & Baharuddin, A. (2021). *Evaluasi Kinerja Terminal Leuwipanjang Kota Bandung*. Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik, 2(1), 65–78. <https://doi.org/10.52920/Jttl.V2i1.31> Hadi
- Mulyadi, D., Nurasa, H., & Halimah, M. (2021). *Implementasi Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Tipe C Di Banjarnegara Kabupaten Bandung Implementation of Type C Terminal Management Policy In Banjarnegara Regency (Studi Kasus Di Terminal Banjarnegara Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)*. Responsive, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/Responsive.V4i1.32245>
- Munandar, Aris. (2011). *Persepsi Stakeholder Terhadap Lokasi Dan Fungsi Terminal Penumpang Tipe A Kabupaten Kebumen*. Jurnal Bumi Indonesia
- Nasrullah, J. (2015). *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Jakarta: CV Pustaka Setia. Jawa Barat.
- Octaviana, Y. (2017). Studi Tentang Pengelolaan Terminus Bus Antar Kota Dalam Provinsi di Kota Balikpapan. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 241–254.
- Rosmalah, S. et al. (2024). *Sosiologi Pembangunan Masyarakat Tani. Jawa Tengah*: Jakarta: NEM.
- Soroso, A. H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjarnegara Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Jakarta: Wacana Indahsari.
- Sumbi, K., & Firdausi, F. (2016). Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2), 41.
- Theressia, A. et al. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tonny, N. F. (2015). *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Winardi, W. (2019). Stakeholder Governance Strategy. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(1), 1– 17.
- Wulandari, A. (2020). *Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication)*. Sedayu Sukses Makmur. Yogyakarta.
- Yulivan, I. (2021). *Manajemen Strategik*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
-